



Keluhkan Bantuan Biaya Replanting

■ Cornelis-Angeline Sampaikan ke Pemerintah

LANDAK, TRIBUN - Petani kelapa sawit di Kabupaten Landak nilai bantuan replanting sawit senilai Rp 30 juta per hektare tidak sebanding dengan biaya produksi saat ini. Hal itu disampaikan petani kelapa sawit saat menghadiri reses anggota DPRD Kalimantan Barat Angeline Fremalco bersama anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Cornelis, Bupati Landak 2017-2022 Karolin Margret Natasa serta Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Landak Yulianus Edo di aula Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Landak, Sabtu (11/2/23).

Adilim, Ketua Koperasi Produsen Repo Barage Maju, menuturkan keluhan itu disampaikan oleh para pekebun sawit yang tergabung dalam program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP).

Mereka menganggap bantuan replanting sawit senilai Rp 30 juta rupiah per hektare pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sudah tidak relevan dan tidak efektif dengan biaya produksi saat ini. Pasalnya harga bibit kelapa sawit saat ini terus bertambah mahal, begitu pula dengan harga pupuk dan biaya perawatan kebun lainnya.

"Kalau kita hitung saat ini tiga puluh juta itu sudah tidak cukup lagi. Menurut hitungan kami, untuk saat ini biaya tersebut berkisar antara enam pu-

biaya replanting ini saya rasa juga sudah tidak sesuai mengingat harga bibit, pupuk, maupun hal lain memang sudah tidak relevan

Cornelis
Anggota DPR RI

juh juta rupiah per hektare. Kami berharap aspirasi ini bisa disampaikan ke pemerintah melalui ibu Angeline dan pak Cornelis," kata Adilim.

Senada, Ketua Koperasi Sinar Jampana, Herodias Ruslan, menyebut penyaluran bantuan dari pemerintah saat ini terkesan sangat lambat. Baik itu dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana produksi, akses transportasi jalan dan jembatan maupun bantuan bibit dan pupuk.

Dikatakannya, sebagai peserta program PSR pertama di Kabupaten Landak sejak 2019, pihaknya belum juga mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah. Padahal kebun-kebun milik peserta program tersebut sudah menghasil-

kan TBS kelapa sawit sekitar 2 ton per bulan.

"Jadi sekarang untuk menanggulangi hal tersebut (kebutuhan sarana dan prasarana) selama ini kita bergotong royong sesama anggota koperasi seadanya saja," pungkas Ruslan.

Curhatan tersebut pun disambut baik oleh anggota DPR RI Cornelis, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Menurut Cornelis, PSR sebagai program pemerintah bertujuan agar masyarakat memiliki kebun secara pribadi. Di mana masyarakat juga harus memiliki bukti atas kepemilikan tanah dan hitungan biaya yang harus pemerintah bantu untuk program PSR tersebut.

"Untuk biaya replanting ini saya rasa juga sudah tidak sesuai mengingat harga bibit, pupuk, maupun hal lain memang sudah tidak relevan. Ini (keluhan petani) akan saya sampaikan ke kementerian, termasuk sarana dan prasarana produksi untuk kelapa sawit," ujar Cornelis.

Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Barat Angeline Fremalco, menyebut akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Dinas Perkebunan Kalimantan Barat dan ke Gubernur Kalimantan Barat agar usulan tersebut bisa langsung disampaikan ke pemerintah pusat. **(lan)**